

**PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALISIS
KEMANDIRIAN: STUDI KASUS APBD DAN LRA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA DAN SELURUH KABUPATEN DI MADURA
TAHUN 2014 - 2018**

Bedy Satria Rizky Wijaya

**Pembimbing:
Rika Yulianti, S.E., M.M.
Nanik Kustiningsih, S.E., M.M.**

Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Mahardhika Surabaya

e-mail: bedysatria@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kemandirian; kemampuan PAD Pemerintah Daerah Surabaya dan Madura untuk memenuhi kewajibannya guna pembangunan masyarakat; ketergantungan kepada pemerintah pusat dan pihak eksternal lainnya; dan untuk mengetahui kegiatan belanja dan transfer ke lima pemerintah daerah ini digunakan paling banyak untuk apa. Dipilihnya wilayah Surabaya dalam penelitian ini guna mengetahui apakah pembangunan Jembatan Suramadu akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Madura sebagaimana isu dimasyarakat bahwa pasca diresmikannya Jembatan Suramadu maka wilayah Madura akan sejajar dengan Surabaya yang telah maju. Penelitian ini fokus pada alokasi APBD maupun LRA tahun 2014 hingga 2018 yang merupakan instrumen pemerintah untuk melaksanakan roda pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif serta pendekatan *eksplanatoris* (Penjelasan rasio keuangan). Hasil fakta penelitian menunjukkan kemandirian Pemda Surabaya adalah sedang sedangkan Pemda seluruh Madura rendah sekali. Kebutuhan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan eksternal lainnya masih diatas 75% dan alokasi pengeluaran paling banyak untuk alokasi belanja pegawai. Sarannya adalah perlu adanya inovasi baru untuk mendongkrak PAD dan penerapan *e-budgeting* sebagai sarana pengendalian kebocoran keuangan dan pemangkasan belanja yang efektif dan efisien.

Keywords: Kemandirian Daerah, PAD, Rasio Keuangan, APBD, LRA, LAKIP

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah (*Government Organization*) merupakan organisasi sektor publik terbesar. Dalam menjalankan roda pemerintahannya maka pemerintah menggunakan sebuah instrumen yang disebut dengan APBN untuk pemerintah pusat dan APBD untuk pemerintah daerah. Ketika

memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Presiden Soekarno pernah menyampaikan bahwa setelah Indonesia merdeka maka Negara Indonesia harus siap untuk menjadi bangsa yang mandiri. Mandiri dalam hal ini adalah Bangsa Indonesia harus mampu menjalankan roda pemerintahan tanpa adanya ketergantungan (finansial) dari negara lain. Semakin

tinggi kemandirian suatu bangsa maka kedaulatan negara akan semakin tinggi dan tentunya akan disegani oleh negara-negara lain. Apabila suatu negara dalam menjalankan kewajibannya terlalu bergantung pada pembiayaan (hutang) dari pihak luar negeri sedangkan kemampuan pendapatannya tidak mencukupi untuk melaksanakan kewajibannya (belanja dan transfer negara) maka kedaulatan negara tersebut akan semakin rendah. Sehingga segala kebijakan di negara tersebut akan mudah diinterferensi oleh pihak (negara) yang memberikan hutang.

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhann (Halim, 2012: 230). Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Dan untuk Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal (Halim, 2012: 221-234). Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah.

Sedangkan untuk rasio keserasian menunjukkan bahwa dengan rasio belanja modal yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah (Halim, 2012: 221-234).

Rumusan Masalah

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana penilaian Kemandirian dilihat dari analisa rasio PAD terhadap total pendapatan masing-masing Pemerintah Daerah Surabaya dan Madura?
2. Bagaimana kemampuan PAD masing-masing Pemerintah Daerah Surabaya dan Madura untuk melaksanakan belanja dan transfer yang merupakan kewajibannya?
3. Bagaimana (berdasarkan analisis rasio) ketergantungan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pihak-pihak lain untuk melaksanakan kewajiban belanja dan transfer masing-masing Pemerintah Daerah Surabaya dan Madura?
4. Belanja atau transfer apa yang memiliki prosentase paling tinggi terhadap total belanja dan transfer masing-masing Pemerintah Daerah Surabaya dan Madura?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sadono dalam repo.iain-tulungagung.ac.id diakses tanggal 6 Desember 2019).

Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang dapat digunakan dalam memahami

masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan (Mahsun, 2011: 135). Penggunaan analisis rasio pada akuntansi sektor publik (pemerintahan) khususnya pada APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan yang tetap mengenai nama dan kaidah pengukurannya (KS, 2016: 26).

Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah

Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah

menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi) semakin rendah. Rasio yang digunakan untuk mengukur Kemandirian Pemerintah Daerah adalah [Halim (2012) dalam KS, 2016: 27]:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Menurut Halim (2004:188) untuk melihat tingkat rasio kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilihat dari empat pola

hubungan yaitu, pola hubungan *instruktif*, pola hubungan *konsultatif*, pola hubungan *partisipatif* dan pola hubungan *delegatif*.

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	<i>Instruktif</i>
Rendah	25%-50%	<i>Konsultatif</i>
Sedang	50%-75%	<i>Partisipatif</i>
Tinggi	75%-100%	<i>Delegatif</i>

Sumber: Halim, 2004

Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rasio Efektivitas dapat dirumuskan [Halim (2012) dalam KS, 2016: 28]:

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Kriteria Pengukuran Efektivitas

Presentase	Kriteria
X > 100%	Efektif
X = 100%	Efektivitas Berimbang
X < 100%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2010 dalam dalam KS (2016:29)

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah merupakan perbandingan antara realisasi belanja yang telah direncanakan dengan realisasi pendapatannya. Semakin kecil rasio

efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut (Mardiasmo, 2013: 112):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
Pegukuran Efisiensi

Presentase	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang Dari 100%	Efisien

Sumber: Mohammad Mahsun (2011:187)

3. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap data APBD dan/ atau LRA Kota Surabaya dan seluruh kabupaten di Madura tahun 2014 sampai dengan 2018.

Jenis Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif serta pendekatan *eksplanatoris* (Penjelasan) pada objek penelitian (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2014: 4). Pemilihan metode tersebut dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan observasi terhadap implementasi suatu peristiwa dan membandingkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori yang ada serta dituangkan dalam suatu penjelasan tertulis berupa karya ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) untuk mendiskripsikan atau memaparkan atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Surabaya dan Kabupaten Se-Madura yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau Laporan Realisasi Anggaran tahun 2014 hingga 2018.

Sumber Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama didalam sebuah penelitian karena tujuan dari penelitian itu sendiri adalah untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2012: 308). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara. Peneliti menggunakan wawancara kualitatif yang dilakukan dengan *face to face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, melalui telepon atau terlibat langsung dalam *focus group interview* (Creswell, 2012: 181). Wawancara ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan opini dan pandangan para partisipan. Dokumentasi merupakan data sekunder dalam penelitian ini. Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian (Margono, 1997: 187). Data sekunder ini dijadikan data utama dalam penelitian ini. Alasan mengapa data sekunder berupa dokumentasi ini dijadikan data

utama dikarenakan peneliti ingin meneliti suatu peristiwa berdasarkan data yang absah dan valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik dan Analisis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dokumentasi atas APBD Perubahan yang telah disahkan dan disetujui oleh legislatif DPRD dan kepala daerah serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2014 hingga 2018 yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Se-Suramadu.

Analisis data dilakukan setelah seluruh data terkumpul oleh Peneliti. Dalam mengolah data kualitatif dengan model alir dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang ketiganya dilakukan secara bersama-sama (Miles dan Huberman, 1992: 16). Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi Reduksi Data, Penyajian Data, Analisis Data, dan Penarikan Kesimpulan.

4. ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Data Penelitian

Data penelitian yang telah peneliti himpun adalah Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) audited oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2014 hingga 2018 untuk Pemerintah Kota Surabaya; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014, 2017, dan 2018 serta dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 – 2016 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan; APBD Perubahan tahun 2014 – 2016 (sumber: jdih.setjen.kemendagri.go.id) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) audited oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2017 hingga 2018 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang; LRA audited oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2014 hingga 2018 untuk Pemerintah Kabupaten Pamekasan; dan LRA audited tahun 2014 hingga 2016 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017 dan 2018 untuk Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Hasil Penelitian

Dari pengolahan data diperoleh data-data rasio sebagaimana berikut:

Rasio Kemandirian

Rasio Dan Penilaian Kemandirian Pemerintah Daerah Se-Suramadu (Data 2014 – 2018)

KABUPATEN/ KOTA	2014		2015		2016		2017		2018	
SURABAYA	54.64 %	Sedang	60.97 %	Sedang	59.92 %	Sedang	64.25 %	Sedang	60.83 %	Sedang
BANGKALAN	8.14%	Rendah Sekali	9.82%	Rendah Sekali	10.92 %	Rendah Sekali	13.70 %	Rendah Sekali	10.87 %	Rendah Sekali
SAMPANG	9.06%	Rendah Sekali	6.96%	Rendah Sekali	8.35%	Rendah Sekali	13.05 %	Rendah Sekali	7.97%	Rendah Sekali
PAMEKASAN	11.23 %	Rendah Sekali	10.12 %	Rendah Sekali	9.76%	Rendah Sekali	12.76 %	Rendah Sekali	12.08 %	Rendah Sekali
SUMENEP	9.86%	Rendah Sekali	8.84%	Rendah Sekali	10.15 %	Rendah Sekali	9.24% %	Rendah Sekali	10.14 %	Rendah Sekali

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

Rasio PAD Terhadap Total Belanja dan Transfer

Rasio PAD Terhadap Total Belanja dan Transfer (Data 2014 – 2018)

KABUPATEN/KOTA	2014	2015	2016	2017	2018	RATA-RATA
SURABAYA	57.95%	62.18%	57.19%	65.24%	60.82%	60.67%
BANGKALAN	7.32%	9.55%	10.29%	13.46%	9.96%	10.12%
SAMPANG	8.37%	6.26%	7.39%	12.59%	8.02%	8.53%
PAMEKASAN	12.38%	9.72%	9.57%	14.15%	12.94%	11.75%
SUMENEP	10.10%	8.82%	10.20%	8.35%	9.10%	9.31%

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

Rasio Pendapatan Transfer Terhadap Total Belanja dan Transfer

Rasio Pendapatan Transfer Terhadap Total Belanja dan Transfer (Data 2014 – 2018)

KABUPATEN/KOTA	2014	2015	2016	2017	2018	RATA-RATA
SURABAYA	47.68%	39.42%	38.18%	35.66%	36.34%	39.46%
BANGKALAN	82.55%	87.34%	83.76%	84.78%	77.05%	83.09%
SAMPANG	84.00%	83.52%	80.99%	82.85%	88.61%	83.99%
PAMEKASAN	89.68%	80.51%	82.89%	93.26%	89.74%	87.22%
SUMENEP	92.32%	90.85%	90.27%	79.39%	78.33%	86.23%

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

Analisa Alokasi Anggaran atau Realisasi Belanja Tertinggi APBD

Analisa Alokasi Anggaran atau Realisasi Belanja Tertinggi APBD (Data 2014 – 2018)

KABUPATEN/ KOTA	2014		2015		2016		2017		2018	
	SURABAYA	38.3 3%	Belanja Pegawai	35.8 4%	Belanja Pegawai	36.1 7%	Belanja Barang dan Jasa	36.4 7%	Belanja Barang dan Jasa	40.4 4%
BANGKALAN	57.9 4%	Belanja Pegawai	51.4 4%	Belanja Pegawai	52.9 0%	Belanja Pegawai	46.2 9%	Belanja Pegawai	48.8 4%	Belanja Pegawai
SAMPANG	46.8 0%	Belanja Pegawai	37.0 2%	Belanja Pegawai	36.0 2%	Belanja Pegawai	36.3 1%	Belanja Pegawai	36.4 3%	Belanja Pegawai
PAMEKASAN	51.3 4%	Belanja Pegawai	42.6 9%	Belanja Pegawai	41.8 2%	Belanja Pegawai	41.0 5%	Belanja Pegawai	40.5 2%	Belanja Pegawai
SUMENEP	55.8 0%	Belanja Pegawai	47.6 5%	Belanja Pegawai	47.9 7%	Belanja Pegawai	43.4 6%	Belanja Pegawai	41.8 8%	Belanja Pegawai

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada tahun 2014 hingga 2018 Kemandirian Pemerintah Kota Surabaya konsisten memiliki kategori sedang dengan rasio kemandirian rata-rata 60,12%. Rasio kemandirian tertinggi yakni pada tahun 2017 mencapai 64,25%, sedangkan terendah pada tahun 2014 sebesar 54,64%. Untuk wilayah Madura yang didalamnya ada Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep tingkat kemandirian seluruhnya tergolong rendah sekali, dan hal ini konsisten dari tahun 2014 hingga 2018. Selama 5 tahun tersebut rata-rata kemandirian untuk Pemerintah Kabupaten Bangkalan yakni 10,69%, Pemerintah Kabupaten Sampang 9,08%, Pemerintah Kabupaten Pamekasan 11,19%, dan Pemerintah Kabupaten Sumenep 9,65%. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi kepala daerah untuk mencari sumber-sumber atau meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah, sehingga ketergantungan kepada penerimaan eksternal dapat seminimal mungkin dan dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat Madura.

Menurut peneliti Pemerintah Daerah Surabaya, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep ini masih belum cukup kemampuan PADnya untuk melaksanakan kewajiban belanja

dan/ atau transfer pemerintahannya sendiri. Masih diperlukan bantuan penerimaan dari pihak eksternal pemerintahan baik dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun swasta (pembiayaan hutang atau hibah). Mengacu pada data poin 4.4.1 untuk Pemerintah Kota Surabaya kemampuan PAD terhadap kewajiban belanja dan transfer rata-rata mendukung atau *support* 60,67%, untuk Pemerintah Kabupaten Bangkalan 10,12%, Pemerintah Kabupaten Sampang 8,53%, Pemerintah Kabupaten Pamekasan 11,75%, Pemerintah Kabupaten Sumenep 9,31%. Analisa rasio antara PAD dengan total Belanja dan transfer sebagaimana telah dipaparkan tersebut sangat kontras sekali terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Surabaya dan Madura. Kehadiran Jembatan Suramadu tidak berdampak signifikan pada peningkatan PAD di Madura.

Mengacu pengolahan data pada poin 4.4.1 pihak eksternal masih sangat berperan dalam membantu Pemerintah Daerah Surabaya, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep dalam memenuhi kewajiban belanja dan transfernya. Untuk Pemerintah Kota Surabaya dukungan Pemerintah Pusat dalam membantu melaksanakan kewajiban belanja dan ransferya rata-rata 27,99%, Pemerintah Provinsi 11,47%, dan

pihak eksternal lainnya 0,86%. Dari prosentase tersebut ketergantungan penerimaan dari pihak eksternal masih tergolong sedang. Peran Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam membantu melaksanakan kewajiban belanja dan transfernya yakni rata-rata sebesar 77,69%, Pemerintah Provinsi 5,41%, dan pihak eksternal lainnya 1,03%. Dari prosentase tersebut ketergantungan penerimaan dari pihak eksternal masih tergolong sangat tinggi. Pemerintah Kabupaten Sampang dibantu oleh Pemerintah Pusat dalam membantu melaksanakan kewajiban belanja dan transfernya yakni rata-rata sebesar 74,93%, Pemerintah Provinsi 9,06%, dan pihak eksternal lainnya 1,04%. Dari prosentase tersebut ketergantungan penerimaan dari pihak eksternal masih tergolong sangat tinggi. Kontribusi Pemerintah Pusat dalam membantu melaksanakan kewajiban belanja dan transfer Pemerintah Kabupaten Pamekasan yakni rata-rata sebesar 81,91%, Pemerintah Provinsi 5,31%, dan pihak eksternal lainnya 5,49%. Dari prosentase tersebut ketergantungan penerimaan dari pihak eksternal masih tergolong sangat tinggi. Tidak jauh berbeda dengan Kabupaten lainnya, untuk Pemerintah Kabupaten Sumenep peran Pemerintah Pusat dalam membantu melaksanakan kewajiban belanja dan transfernya yakni rata-rata sebesar 81,08%, Pemerintah Provinsi 5,15%, dan pihak eksternal lainnya 1,01%. Dari prosentase tersebut ketergantungan penerimaan dari pihak eksternal masih tergolong sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, Pemerintah Kota Surabaya memperoleh transfer dari pemerintah provinsi paling banyak yakni rata-rata Rp 804.835.438.214.

Sedangkan untuk Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep berturut-turut rata-rata Rp 107.578.547.330; Rp 157.919.733.620; Rp 89.091.044.559; dan Rp 105.110.972.107. Dari data tersebut alokasi transfer dari pemerintah provinsi ke Pemerintah Kota Surabaya cenderung lebih tinggi dibandingkan Kabupaten yang ada di Madura meskipun pada kenyataannya kebutuhan suntikan dana Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep untuk melaksanakan kewajiban belanja dan transfer cukup tinggi.

Mengacu pada tabel 4.9 postur APBD baik Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep banyak terkuras untuk memenuhi belanja pegawai. Hanya pada Pemerintah Kota Surabaya saja pada tahun 2016 hingga 2018 prosentase belanja tertinggi terletak pada belanja barang dan jasa. Diketahui bahwa dalam kegiatan pembangunan masyarakat tidak hanya tentang memenuhi belanja administrasi pemerintahan namun juga banyak sektor yang perlu diperhatikan. Misalnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Peneliti berpendapat bahwa jika postur APBD banyak terkuras untuk belanja pegawai atau membayar gaji pegawai pemerintah lebih dari 50% maka pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur belum cukup dirasakan oleh masyarakat. Misalnya diketahui bahwa biaya pendidikan dan kesehatan banyak yang belum terjangkau oleh masyarakat. Meskipun pendidikan SD hingga SLTP sudah digratiskan namun untuk SLTA dan Perguruan Tinggi tidak gratis, sedangkan tuntutan dunia kerja seiring kemajuan zaman standarnya terus meningkat. Dalam

hal kesehatan meskipun masyarakat dibantu oleh BPJS namun masih ada pengobatan tertentu yang tidak dibantu oleh BPJS. Selain itu dalam hal infrastruktur masih banyak daerah-daerah tertinggal yang masih sulit diakses untuk menuju daerah tersebut.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam BAB IV dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Untuk Pemerintah Kota Surabaya memiliki rasio kemandirian rata-rata kategori sedang (*partisipatif*) dengan prosentase rata-rata 60,12%. Atas hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa peran pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah (belum mandiri sepenuhnya). Mengapa dikatakan belum mandiri sepenuhnya? Hal ini dikarenakan prosentase PAD terhadap kewajiban belanja dan transfer masih diangka rata-rata 60,67% sedangkan pendapatan transfer dari pihak eksternal (pemerintah pusat, provinsi maupun lainnya) menyumbang rata-rata 40,32% untuk membantu Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan kewajiban belanja dan transfernya, artinya Pemerintah Kota Surabaya masih memerlukan suntikan penerimaan dari eksternal.
- b. Untuk Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep memiliki rasio kemandirian rata-rata kategori rendah sekali (*Instruktif*) dengan

prosentase rata-rata 10,15%. Atas hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa peran pemerintah pusat dan pihak lainnya sangat dominan. Prosentase PAD terhadap kewajiban belanja dan transfer sangat rendah yakni diangka rata-rata 9,93%. Sedangkan pendapatan transfer dari pihak eksternal (pemerintah pusat, provinsi maupun lainnya) menyumbang rata-rata 85,13% untuk membantu Pemerintah Kabupaten seluruh Madura melaksanakan kewajiban belanja dan transfernya.

- c. Dari seluruh Pemerintah Daerah mulai dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep alokasi belanja banyak dihabiskan untuk kegiatan belanja pegawai atau untuk menggaji pegawai pemerintah atau ASN baik yang berstatus PNS, non-PNS, maupun tenaga ahli. Namun sepanjang tahun 2016 hingga 2018 hanya Pemerintah Kota Surabaya yang konsisten mengalokasikan belanja dan transfer tertingginya untuk kegiatan belanja barang dan jasa, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya sudah fokus mengarah pada pembangunan infrastruktur.

Saran

Dari hasil penelitian dan penarikan kesimpulan peneliti memiliki saran yang membangun baik bagi Pemerintah Daerah Surabaya dan Madura, pihak swasta, maupun masyarakat setempat yakni:

- a. Diperlukan inovasi bagi pemerintah dan swasta untuk menambah pundi-pundi PAD seperti misalnya meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata, industri, maupun

- perdagangan. Salah satu contoh inovasi yakni menyerukan kepada usaha retail modern atau pada acara CFD misalnya dengan pengadaan pajak atau retribusi parkir sehingga pendapatan atas pajak atau retribusi parkir tumbuh dan sekaligus dengan adanya ini dapat memperdaya masyarakat kelas menengah ke bawah untuk memperoleh pekerjaan. Saran yang kedua yakni menyerukan para pejabat daerah dan bekerjasama dengan media maupun *marketplace* untuk mempromosikan dan menggunakan produk-produk unggulan lokal masing-masing daerah untuk dikenal secara interlokal maupun internasional.
- b. Mempermudah investasi dan pembangunan bagi investor dari luar baik dari segi pemangkasan administrasi birokrasi maupun pemberian pelayanan terbaik dari aparat pemerintah dengan etika yang baik. Karena diketahui bahwa untuk mendapatkan suatu izin usaha maka diperlukan beberapa izin-izin instansi yang lain dalam sekumpulan organisasi pemerintah daerah, oleh karena itu diperlukan satu saja dinas yang mengakomodir pengurusan izin-izin tersebut.
 - c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kemungkinan-kemungkinan kebocoran PAD dengan penerapan *e-bugeting* yang transparan. *E-budgeting* adalah sistem penyusunan anggaran secara elektronik, melalui penggunaannya disektor pemerintahan diharapkan mampu memproteksi pelaksanaan penganggaran di Indonesia.
- Penerapan sistem ini sesuai dengan semangat Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengertian transparansi dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 ini diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
- d. Masyarakat harus siap dan saling mendukung terhadap kemajuan zaman dinamis, tidak mudah menolak suatu perubahan atau kebijakan yang pada dasarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat. Untuk rencana Madura menjadi provinsi alangkah baiknya semua pihak menahan diri karena jika tetap dilaksanakan maka akan semakin menambah beban keuangan pemerintah pusat.
 - e. Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan kajian ulang terhadap pos-pos belanja paling besar misalnya pada belanja pegawai agar pengeluaran lebih efektif dan efisien dan bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan yang lain.